

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat adalah negara penerima imigran paling banyak di dunia. Pada tahun 2018, tercatat sekitar 13,7 % dari total populasi atau 44,8 juta penduduk Amerika Serikat adalah seorang imigran. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 77% dari imigran yang masuk ke Amerika terdaftar untuk tinggal secara legal pada tahun 2017 sementara 23% lainnya masuk kedalam kategori ilegal secara hukum. Menurut data federal tahun 2021, Meksiko adalah negara asal terbanyak dari imigran usia dewasa yang masuk ke Amerika Serikat sebesar 24%, diikuti oleh India sebesar 6%, Cina 5%, Filipina 5%, El Salvador 3%, dan Vietnam sebesar 3%.¹

Tingginya angka imigran di Amerika Serikat membuatnya tidak terlepas dari isu keamanan nasional. Beberapa golongan masyarakat menganggap bahwa masuknya imigran, khususnya imigran ilegal, menciptakan resiko besar terhadap meningkatnya kejahatan dan terorisme di Amerika Serikat.

Sikap anti imigran semakin terlihat pada era Donald Trump. Trump yang telah menunjukkan sikap negatif terhadap masalah migrasi sejak masa kampanyenya ini memiliki slogan “*America First*” sebagai fokus kepemimpinannya ketika menjadi presiden. Slogan ini secara sederhana bertujuan

¹ Abby Budiman, 2020, Key Findings About US Immigrants, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2020/08/20/key-findings-about-u-s-immigrants/>, diakses pada 28 Maret 2024.

untuk mengedepankan kepentingan Amerika Serikat sebagai prioritas utama kebijakan, salah satunya dengan memperketat penanganan dan pencegahan imigrasi dan terorisme sebagai upaya menjaga kepentingan nasional.² Setelah Trump resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2017, slogan ini menjadi prinsip kebijakan luar negeri resmi pemerintahan presiden Trump di Amerika Serikat.³

Kebijakan “*America First*” ini memiliki dampak pada sebagian besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam isu imigrasi, pemerintahan Trump telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang cukup keras. Pada awal masa kepresidenannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan sementara masuknya penduduk dari tujuh negara mayoritas muslim. Pada 25 Januari 2017, Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif terkait pembangunan tembok di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, menambah 5.000 petugas perbatasan baru, menambah 10.000 petugas imigrasi baru, serta memberlakukan denda pendanaan federal untuk kota-kota suaka yang memberikan perlindungan terhadap imigran.⁴

Pada 6 April 2018, Jaksa Agung Jeff Sessions mengumumkan kepada semua kantor Kejaksaan Amerika Serikat di sepanjang Perbatasan Barat Daya mengenai kebijakan “*zero-tolerance*”. Kebijakan ini melarang segala upaya masuk dan yang telah masuk secara ilegal ke Amerika Serikat oleh orang asing.⁵

² H. Sanjaya, 2017, Amerika dan Mimpi Trump, Spring of Life, diakses pada 3 April 2024.

³ White House Gov, Tanpa Tahun, Foreign Policy, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/>, diakses pada 28 Maret 2024.

⁴ VOA Indonesia, 2017, Trump Tanda Tangan Perintah Untuk Bangun Tembok Perbatasan Meksiko, diakses pada 2 April 2024.

⁵ US Department of Justice, 2018, Press Release: Attorney General Announces Zero Tolerance

Kebijakan ini menjadi pembenaran atas tindakan pemisahan anak-anak dan orangtuanya oleh pemerintah Amerika Serikat di perbatasan Meksiko sejak tahun 2017.

Tercatat antara Oktober 2017 hingga Mei 2018, terdapat lebih dari 2.700 anak-anak imigran dipisahkan dari orang tua mereka di Amerika Serikat secara tidak resmi. Keluarga imigran yang dipisahkan ini adalah mereka yang mencari suaka di Amerika Serikat dengan melintasi perbatasan secara ilegal. Pemisahan ini terjadi ketika para orang tua akan dipenjara untuk menunggu diadili secara hukum pidana di penjara federal, sedangkan anak-anak yang menurut hukum tidak boleh dipenjara akan dikirim kepada pengasuhan pemerintah dibawah *Department of Health and Human Service*.⁶

Kebijakan ini diklaim oleh presiden dan pejabat tinggi pemerintahan saat itu sebagai respon terhadap lonjakan kasus imigran yang bersifat sementara dan hal ini telah dilakukan sesuai undang-undang yang telah ada. Namun, kebijakan ini telah menciptakan kontroversi besar yang memunculkan kritik dan protes keras terhadap pemerintah karena dianggap kejam dan memunculkan perdebatan hukum dan moral terutama setelah beredar rekaman video dan audio diduga anak-anak yang ditahan dirumah berlantai beton dan dalam kondisi menangis karena dijauhkan dari orang tua.⁷ Akhirnya kebijakan ini diakhiri ketika Presiden Donald Trump menandatangani sebuah surat perintah pada tanggal 20 Juni untuk

Policy for Criminal Illegal Entry, <https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-announces-zero-tolerance-policy-criminal-illegal-entry>, diakses pada 26 Maret 202

⁶ Narea, N, The Trump Administration Just Admitted that It Separated An Additional 1,500 Immigrant Families, Vox, <https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/10/25/20931992/trump-administration-aclu-lawsuit-separate-families-immigrant-policy-1500>, diakses pada 2 April 2024.

⁷ Dara Lind, 2018, The Trump Administration's Separation of Families At The Border, Explained, <https://www.vox.com/2018/6/11/17443198/children-immigrant-families-separated-parents>, diakses pada 26 Maret 2024.

menghentikan kebijakan pemisahan anak imigran dari keluarganya di perbatasan AS dan Meksiko. Dalam surat perintah tersebut, Trump menegaskan bahwa keluarga imigran yang ditangkap saat memasuki AS secara ilegal akan tetap ditahan bersama, namun pelanggaran mereka juga akan diproses.⁸ Namun, kebijakan ini tidak serta merta selesai, karena dalam beberapa bulan setelahnya pemerintah Amerika Serikat cenderung dianggap abai dalam proses mempersatukan kembali keluarga yang terpisah serta adanya beberapa migran yang masih ditahan sehingga masih memicu berbagai kritik dari masyarakat.⁹

Sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan untuk membantu penulisan penelitian ini sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang pertama adalah penelitian mengenai “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan Meksiko”. Penelitian ini membahas perubahan kebijakan luar negeri terhadap imigran yang terjadi selama masa pemerintahan Donald Trump hingga Joe Biden terhadap imigran di perbatasan Meksiko. Penelitian ini menyoroti perbedaan yang kontras dari kebijakan-kebijakan dua pemerintahan tersebut dengan menggunakan faktor-faktor domestik dan internasional yang melandasi perubahan kebijakan antara dua pemerintahan yang berbeda tersebut berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Gustavsson.¹⁰

⁸ Miles Parks *et al*, 2018, Trump Signs Order to End Family Separations, NPR, <https://www.npr.org/2018/06/20/621798823/speaker-ryan-plans-immigration-votes-amid-doubts-that-bills-can-pass>, diakses pada 6 Mei 2024.

⁹ NICJ, 2018, Media Coverage of Family Separation, NICJ, diakses pada 2 November 2024.

¹⁰ P. Rahmadhani, 2023, Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam mengatasi Imigran Ilegal Di Perbatasan Dengan Meksiko. FISIP. Hubungan Internasional. Universitas

Studi kepustakaan kedua adalah penelitian mengenai “American First: Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imigran Ke Amerika Serikat”. Penelitian kedua ini menggunakan konsep dari salah satu kebijakan luar negeri, yakni isolasionisme yang menjadi strategi kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump untuk membatasi masuknya imigran ke Amerika Serikat dengan slogan *America First*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil dalam rangka memperkuat ‘*america first*’ ini, termasuk mengenai imigrasi, hanya berfokus pada urusan domestik AS, dan cenderung mengabaikan kerja sama internasional dan perjanjian internasional.¹¹

Studi kepustakaan ketiga adalah “Kebijakan Imigrasi *Zero Tolerance* Amerika Serikat: Analisis Kekerasan Struktural”. Penelitian ini lebih menyoroti kepada bagaimana kebijakan *zero tolerance* yang diberlakukan oleh Trump menimbulkan kekerasan struktural terhadap para imigran di perbatasan Meksiko.¹²

Ketiga penelitian tersebut membantu penulis dalam penulisan penelitian ini karena memiliki lingkup masalah yang hampir sama. Namun fokus yang menjadi permasalahan antara tiga penelitian sebelumnya dengan penelitian ini akan berbeda. Penelitian ini lebih berfokus kepada perubahan yang terjadi pada kebijakan imigrasi Amerika Serikat dengan studi kasus pemisahan keluarga yang terjadi pada tahun 2017- 2018. Penelitian ini juga menggunakan teori *foreign policy analysis* serta konsep migrasi internasional dalam menjabarkan

Andalas.Padang.

¹¹ Taufik & S.U. Pratiwi, 2021, American First : Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imigran Ke Amerika Serikat, *Intermestic: Journal of International Studies* 6, no. 1:219, diakses pada 1 Maret 2023.

¹² K.U. Dewi & D.P. Cahyani, 2020, Kebijakan Imigrasi Zero Tolerance Amerika Serikat: Analisis Kekerasan Struktural, *Th. 14, No.1*: 32.

penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Mengapa Terjadi Perubahan Kebijakan Imigrasi AS Dalam Studi Kasus Pemisahan Keluarga di Perbatasan Meksiko-AS Tahun 2017-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh pengetahuan dan informasi baru terkait studi Hubungan Internasional serta untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar S1 jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan dapat terjadi dalam kebijakan imigrasi dan pemisahan keluarga di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko pada tahun 2017-2018. Penelitian ini secara khusus akan membantu membahas dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan kebijakan ini disertai dengan implikasi dari penerapan teori yang digunakan terhadap pemahaman kebijakan luar negeri dalam konteks ini.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Foreign Policy Analysis

Kebijakan luar negeri adalah seperangkat tindakan dan aturan yang mengatur tindakan otoritas politik independen yang ditempatkan di lingkungan internasional.¹³ Kebijakan luar negeri memiliki sifat yang dinamis dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu karena melibatkan sebuah proses kompleks yang dipengaruhi situasi dan kondisi internasional.¹⁴ Dalam menganalisis proses pembentukan kebijakan luar negeri, dapat menggunakan menggunakan teori *foreign policy analysis*. Teori ini menekankan mengenai manusia sebagai faktor utama penentu perilaku negara sebagai pengambil keputusan, bukan negara.

Valerie M. Hudson dalam bukunya yang berjudul “Foreign Policy Analysis” membagi tingkat analisa menjadi lima tingkatan, yakni (1) individu sebagai pengambil keputusan; (2) kelompok pembuat kebijakan; (3) budaya dan identitas nasional; (4) politik domestik dan oposisi; (5) atribut nasional dan sistem internasional. Namun dalam penelitian ini penulis hanya lebih fokus pada tingkat analisis individu serta tingkat analisis politik domestik dan oposisi.¹⁵

Tingkat analisis individu berfokus pada pemetaan personal pembuat keputusan di suatu negara dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Hudson, terdapat beberapa komponen pemikiran seperti kognisi, persepsi, emosi, dan lain-lain yang berpengaruh pada seorang individu pengambil keputusan.

¹³ Paquin, J.F & Morin, J, 2018, *Foreign Policy Analysis*, London: Palgrave Macmillan.

¹⁴ V. Dugis, 2018, *Explaining Foreign Policy Change*, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, 22,101- 104.

¹⁵ Valerie M. Hudson, 2014, *Foreign Policy Analysis*, Lanham: Rowman & Littlefield.

Kognisi adalah bagaimana individu tersebut mengelola informasi dan persepsi adalah bagaimana akal digunakan dalam memproses informasi. Kemampuan kognisi yang berbeda-beda dari setiap individu memunculkan persepsi yang berbeda-beda pula sehingga anggapan suatu individu pengambil keputusan dapat berbeda-beda dari setiap negara. Selain itu, emosi juga dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan sesuai dengan apa yang individu tersebut pernah alami atau bayangkan. Emosi ini akan mengarahkan perilaku individu dalam menghadapi suatu situasi dan bagaimana ia menangani situasi tersebut.¹⁶

Di sisi lain, menurut Clausewitz yang dikutip oleh Hudson (2013), kebijakan luar negeri adalah bentuk tindak lanjut dari kebijakan politik domestik suatu negara sehingga keduanya sangat berhubungan erat. Oleh karena itu, sifat rezim itu sendiri, dengan segala kekuatan, kelemahan, dan kecenderungannya, harus dijadikan bagian penting dalam analisis apa pun mengenai akar dalam negeri dari kebijakan luar negeri.¹⁷

Ketika melihat politik domestik, maka yang menjadi fokus utama adalah rezim dan struktur pada politik domestik suatu negara. Rezim harus dijadikan analisis penting dalam kebijakan luar negeri karena kebijakan luar negeri mungkin tidak dapat diterapkan jika dalam struktur pemerintahan dalam negerinya terdapat aktor-aktor domestik yang tidak menyetujui kebijakan tersebut.

Aktor-aktor dari politik domestik diantaranya adalah partai politik dan media. Partai politik dalam suatu negara memiliki posisi koalisi dan oposisi yang berbeda-beda. Perbedaan posisi koalisi dan oposisi ini biasanya disebabkan oleh

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

perbedaan ideologi yang juga mempengaruhi cara pandang partai tersebut terhadap suatu masalah dalam maupun luar negeri.

Media yang juga termasuk dalam aktor politik domestik, saat ini telah mampu menyediakan liputan berita dari peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ini menjadikan media memiliki peranan penting dalam menentukan tindakan yang diambil pembuat kebijakan. Pemberitaan dari media akan berpengaruh pada arus informasi antar aktor kebijakan luar negeri serta dalam menarik perhatian publik dan keterkaitannya terhadap penerimaan dalam negeri. Aktor-aktor lain dari politik domestik diantaranya cabang lembaga eksekutif dari pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, pemerintah negara bagian, koalisi bisnis, kelompok kepentingan, serikat pekerja, bahkan hingga individu yang berpengaruh dan kelompok agama.¹⁸

1.4.1.2 Migrasi Internasional

Arti migrasi secara luas adalah aktivitas perpindahan tempat tinggal penduduk secara permanen ataupun semi permanen, tanpa batasan jarak dan alasan dari perpindahan tempat tinggal penduduk tersebut.¹⁹ Terdapat banyak alasan mengapa penduduk ingin melakukan aktivitas imigrasi, ini juga dapat dilakukan secara sukarela maupun terpaksa.

Lee (1996) memperkenalkan sebuah faktor “*push and pull*” yang menjadi alasan umum mengapa manusia ingin melakukan migrasi. Faktor pendorong (*push*) muncul ketika terdapat sebuah masalah dari daerah asal tempat tinggal imigran tersebut, seperti adanya perang, kemiskinan, kelaparan, bencana alam,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Everett S. Lee, 1996, A Theory of Migration, Demography, 3(1).

atau tidak adanya peluang kehidupan yang layak. Sedangkan faktor penarik (*pull*) biasanya terkait dengan tempat tujuan para imigran tersebut, seperti adanya peluang kondisi kehidupan yang lebih baik, kebebasan individu, dan lingkungan yang lebih bisa menjamin kesejahteraan dan keamanan penduduknya.

Migrasi internasional sendiri secara umum dikenal sebagai aktivitas perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi yang terjadi antar negara ini menimbulkan banyak pro dan kontra khususnya bagi negara penerima imigran. Aktivitas migrasi internasional biasanya diterima dengan baik oleh negara yang membuka diri terhadap arus modal dan komoditas.²⁰ Ini dapat terjadi karena migrasi dapat memudahkan negara penerima melakukan pembangunan dengan menyediakan pengetahuan, keahlian, serta tenaga kerja ahli maupun tidak ahli dari para imigran. Penolakan biasanya terjadi karena pandangan negara penerima yang menganggap aktivitas migrasi internasional berkaitan dengan perbedaan budaya yang besar, sehingga hal ini dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara dan identitas nasional.²¹ Dalam hal ini, negara sering menganggap migrasi internasional sebagai suatu masalah yang harus dikontrol dan dibatasi untuk mencegah ancaman dan perubahan-perubahan yang tidak dapat diperkirakan.

Migrasi internasional biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok imigran dan pencari suaka. Imigran terdiri dari dua jenis, yakni imigran legal yang memasuki negara tujuan secara sah, serta imigran ilegal yang merupakan orang

²⁰ Muhammad Fauzan Alamari, 2020, Imigran dan Masalah Integrasi Sosial, *Dinamika Global*, 5.

²¹ Elisabeth Dewi, 2013, Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia, *Jurnal Imiah Hubungan Internasional* 9(1).

yang masuk atau tinggal di suatu wilayah tanpa memiliki izin,²² sedangkan pencari suaka ialah orang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka terhadap perlindungan dari negara tujuan masih belum dipastikan.²³

Kebanyakan para migran yang datang untuk mencari suaka di negara lain tidak hanya datang sebagai individu tetapi juga membawa serta keluarganya. Dampak dari kebijakan terhadap migran juga akan berpengaruh terhadap seluruh sistem keluarga. Ketika bermigrasi seluruh sistem keluarga mereka juga akan berubah sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan perspektif keluarga dalam pembuatan kebijakan mengenai migrasi.²⁴

Anak-anak adalah bagian dari keluarga yang paling rentan dalam proses migrasi ini. Menurut IOM atau International Organization for Migrant, satu dari setiap delapan migran di dunia merupakan anak-anak. Dengan populasinya yang tidak kecil ini, anak-anak migran menjadi korban yang paling rentan terhadap berbagai macam ancaman seperti eksploitasi, pelecehan, kekerasan, perdagangan manusia, dan penahanan.²⁵

Sifat rentan pada anak-anak migran dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, (1) faktor resiko yang sudah ada sebelumnya pada tingkat individu, rumah tangga,

²² G. H. Hanson, 2007, *The Economic Logic of Illegal Migration*, <https://www.cfr.org/report/economic-logic-illegal-immigration>, diakses pada 3 Desember 2024.

²³ NHCR, n.d., *Pencari Suaka*, <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka#:~:text=Seorang%20pencari%20suaka%20adalah%20seseorang%20yang%20menyebut%20dirinya,namun%20permintaan%20mereka%20akan%20perlindungan%20belum%20selesai%20di%20pertimbangkan>, diakses pada 3 Desember 2024.

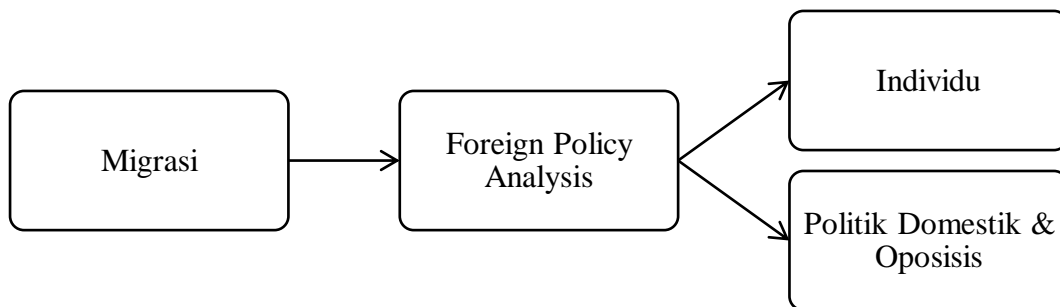
²⁴ M. Robila, *Tanpa Tahun, Integrating A Family Perspective In International Migration Policy*, UN, https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/200911_unpd_cm8_queenscollege.pdf, diakses pada 4 Maret 2024.

²⁵ IOM, *Tanpa Tahun, Protection of Children In Migration*, <https://eea.iom.int/protection-children-migration>, diakses pada 14 April 2024.

dan komunitas; (2) faktor alasan mengenai mengapa mereka melakukan migrasi; serta (3) kondisi khusus yang mereka alami selama di perjalanan hingga menuju negara tujuan migrasi. Selain itu, kerentanan pada anak-anak ini dapat bertambah parah ketika terjadi pada mereka yang tidak didampingi atau dipisahkan dari keluarga mereka sehingga anak-anak dengan kondisi khusus seperti ini memerlukan penanganan yang lebih besar dan spesifik terhadap permasalahan mereka.²⁶

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Digambar oleh penulis

Berdasarkan Berdasarkan rujukan pada latar belakang dan kerangka berpikir yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya, maka terbentuklah bagan

²⁶ *Ibid*

sintesa pemikiran tersebut. Penelitian ini berfokus pada penggunaan konsep migrasi internasional dan penggunaan teori *foreign policy* dengan mempertimbangkan individu pembuat kebijakan serta politik domestik dan oposisi untuk menjelaskan mengenai proses perubahan kebijakan luar negeri.

1.6 Argumen Utama

Persepsi, sentimen, dan emosi negatif yang dimiliki Trump karena pengalaman pribadinya terhadap imigran mendorongnya untuk mengambil kebijakan pemisahan keluarga. Faktor yang paling mempengaruhi pemberlakuan kebijakan ini adalah individu Trump sebagai pengambil kebijakan yang mempunyai wewenang untuk menciptakan kebijakan tanpa melalui persetujuan kongres. Dalam perkembangannya, banyaknya respon laporan dari media mengenai kondisi anak-anak yang dipisahkan dari orang tua mereka dan ditahan di pusat penahanan kemudian memicu kemarahan masyarakat. Untuk pemberhentian kebijakan ini, yang berpengaruh adalah politik domestik dan oposisi yang mendesak Trump agar segera menghentikan kebijakan ini. Dalam hal ini, banyak anggota Kongres dari Partai Koalisi maupun Partai Oposisi yang ikut mengajukan protes dengan berbagai cara untuk menuntut dihentikannya kebijakan pemisahan keluarga. Kritik dan respon yang buruk terhadap kebijakan ini yang membuat pada akhirnya pemerintah Donald Trump mengeluarkan perintah untuk mencabut kebijakan *family separation* dan menerapkan tindakan lanjutan berupa reunifikasi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif untuk menjelaskan alasan terjadinya suatu fenomena. Sugiyono mendeskripsikan penelitian eksplanatif sebagai penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variable- variabel yang diteliti serta hubungan antara variable yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.²⁷ Sedangkan menurut Ulber Silalahi, penelitian eksplanatif adalah suatu metode yang berfungsi menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi.²⁸

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangkauan dalam rentang waktu antara tahun 2017 hingga tahun 2018. Jangkauan penelitian ini dipilih sejak tahun 2017 karena menurut data, temuan adanya anak-anak imigran yang dipisahkan dari orang tua mereka dimulai sejak bulan Oktober 2017. Kemudian batas penelitian ditetapkan pada tahun 2018 karena tepatnya pada tanggal 20 Juni, Donald Trump yang masih menjabat sebagai presiden saat itu memutuskan menandatangani surat perintah untuk menghentikan kebijakan pemisahan anak imigran dan orangtuanya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono adalah data yang secara tidak langsung diperoleh oleh pengumpul data.²⁹ Sedangkan menurut Hasan data

²⁷ Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: ALFABETA

²⁸ Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama.

²⁹ Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: IKAPI.

sekunder adalah data yang akan diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.³⁰ Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh dari studi literatur yang merupakan teknik pengumpulan data dengan meninjau berbagai literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu, media massa, dan lain sebagainya.³¹

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Guba yang dikutip oleh Uhar Suharsaputra adalah sebuah prosedur penelitian yang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan dari manusia dan perilaku yang dapat diamati.³² Dan menurut Strauss dan Juliet, penyebutan penelitian kualitatif digunakan untuk menyebut penelitian yang penemuan dan hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk angka, tabel, dan sebagainya.³³ Penelitian kualitatif cenderung memanfaatkan landasan teori yang dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan keadaan asli lapangan serta untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang dan pembahasan hasil penelitian.³⁴

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian “Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS: Studi Kasus Pemisahan Keluarga di Perbatasan Meksiko-AS Pada Tahun 2017-2018”, penulis menjabarkan tulisannya ke dalam empat bab, yakni sebagai berikut:

³⁰ Hasan, 2002, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia.

³¹ Iskandar 2008, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif), Jakarta: GP Press.

³² U. Suharsaputra, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, Bandung: Refika Aditama.

³³ A. Juliet & C. Strauss, 2003, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³⁴ Rukin, 2019, Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bab I berisikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian baik secara umum maupun khusus, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi dari penelitian ini.

Bab 2 menjabarkan mengenai pengaruh individu pengambil keputusan dalam proses perubahan kebijakan *family separation* di perbatasan Meksiko-AS.

Bab 3 menjelaskan mengenai peran politik domestik dan oposisi dalam proses perubahan kebijakan *family separation* di perbatasan Meksiko-AS.

Bab 4 memuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini berdasarkan pada pembahasan yang telah dijabarkan di bab-bab sebelumnya.